

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Kebijakan adalah acuan pada saat bertindak atau rangkaian keputusan dan tindakan-tindakan sebagai akibat dari intraksi terstruktur dan berulang di gunakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh instansi-instansi pemerintah untuk mencapai suatu kegiatan tertentu dan menentukan keputusan yang akan di capai dalam suatu organisasi. Maka dari itu, dapat dikatakan kebijakan pendidikan merupakan poin penting dalam pendidikan, bahkan menyangkut keberadaan bagi bangsa dalam persaingan global sehingga kebijakan pendidikan harus menjadi yang utama di dalam era globalisasi ini (Syafaruddin, 2008). Dalam hal ini, hal terpenting dalam era globalisasi adalah masyarakat yang demokrasi serta mau bekerja dalam dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk memaksimalkan kembali suasana proses belajar mengajar agar peserta didik mampu mengembangkan bakat yang ada di dalam dirinya serta mampu berfikir aktif dan kreatif dalam mengelola pikirannya masing-masing baik itu dalam segi keagamaan/spiritual, akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan peserta didik tersebut. Tujuan pendidikan Nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan adanya tujuan pendidikan nasional ini, maka peningkatan kualitas pendidikan dapat lebih di tingkatkan dan dapat pula menghadapi tantangan global yang semakin canggih. Tujuan pendidikan nasional merupakan potensi yang harus di kembangkan dan membentuk kerangka berpikir yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berdasarkan nilai-nilai agama, budaya multikultural di Indonesia dan cekatan dalam tuntutan zaman.

Pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dalam pendidikan setiap warga negara akan memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang sebenarnya sebelum mereka mengenal pendidikan. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan isi ini selaras dengan diadakannya tujuan pendidikan. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah sangat serius sehingga di tuangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa:

Ayat 1, setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2, Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Dalam standar pengelolaan khususnya dalam bidang pendidikan dan sektor pembangunan di Indonesia terus-menerus mengalami perubahan baik dari waktu ke waktu dan dalam segi perubahan kebijakan pendidikan, yang berdasarkan perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan dari kebijakan tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan Pendidikan Menengah ada 3 (tiga) pengelolaan yaitu, pengelolaan oleh pemerintah, standar pengelolaan oleh daerah, dan standar pengelolaan satuan pendidikan.

Dengan adanya otonomi daerah sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat di bebaskan ke pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi dan desentralisasi, maka di harapkan masing-masing daerah dan juga masyarakat lebih termotivasi untuk mengembangkan daerah masing-masing agar bisa bersaing secara sehat. Dampak dari otonomi dan desentralisasi terjadi juga di bidang pendidikan. Dengan demikian, tujuan dari otonomi di bidang pendidikan adalah peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan demikian untuk megoptimalkan pengelolaan pendidikan di satu sekolah, maka di perlukan manajemen pengelolaan yang kreatif dan unik dan sesuai dengan konteks yang berlaku. Setiap sekolah di kelola sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah dan peserta didiknya masing-masing. Maka atas dasar itulah muncul model pengelolaan sekolah dengan basis kondisi dan konteks sekolah itu sendiri yang kemudian di kenal sebagai Manajemen

Berbasis Sekolah. Di Indonesia kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah pertama kali muncul secara resmi pada tahun 2000. Ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang rencana strategis Pembangunan Nasional tahun 2000-2004, selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 51 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah diadakan berdasarkan standar pelayanan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Maka dari itu, manajemen berbasis sekolah merupakan prinsip pengelolaan satuan pendidikan dan perlu di sosialisasikan kepada seluruh sekolah agar dapat dipahami sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pendidikan.

Manajemen berbasis sekolah merupakan manajemen sekolah yang sering di sebut sebagai otonomi sekolah (*school autonomy*) atau *site-based* manajemen, yang sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah dalam dunia pendidikan, hal ini dituntut agar terjadinya perubahan dalam manajemen sekolah (Beck & Murphy, 1996). Oleh sebab itu, pengelolaan sekolah di berikan kepada kepala sekolah dalam mengelola dan menggunakan manajemen berbasis sekolah. Menurut Herawan (2016) Manajemen Berbasis Sekolah adalah sebuah model yang memberikan kewenangan kepala sekolah untuk mengambil keputusan secara bersama dengan seluruh warga sekolahnya dalam upaya peningkatan terhadap mutu pendidikan. Faktor-faktor keberhasilan manajemen berbasis sekolah menurut (Fullan & Watson, 1999) adalah metode pengajaran dan pembelajaran model baru, kepala sekolah yang aktif,

mengembangkan hubungan antar guru di dalam dan di luar sekolah, partisipasi orang tua dan masyarakat yang aktif, membangun struktur eksternal untuk melatih dan mendukung kepala sekolah dan guru, serta dengan akuntabilitas yang terbuka.

Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 22 dan Nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada hakikatnya memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan mengatur berbagai kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat sesuai dengan perundang-undangan. Kewenangan yang sudah diberikan kepada kepala daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, pihak sekolah yang memiliki hak otonomi atas hak dan kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah guna menciptakan dan mencapai tujuan pendidikan yang baik dan berguna bagi masyarakat. Tujuan manajemen berbasis sekolah jika di lihat dari pengkajian dan penataan di didalam lingkup sekolah maka kita harus melihat bagaimana kondisi organisasi, misalnya kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman setiap organisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di dalam pembagian urusan pemerintah dalam bidang pendidikan yang menyatakan bahwa “Daerah atau kabupaten maupun kota dapat mengelola pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk mengurus kepentingan pendidikan untuk dapat memperbaiki sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing

daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya sumber daya manusia. Kebijakan manajemen berbasis sekolah memberi peluang untuk menjadi semakin unggul. Sekolah yang menerapkan kebijakan manajemen berbasis sekolah berarti sebagai hasil dalam penyelenggaraan manajemen pengelolaannya berorientasi pada kepentingan sekolah. Secara mandiri sekolah menentukan visi, misi, tujuan, dan segala aktivitas pelaksanaannya. Kurikulum sekolah di susun sesuai tujuan sekolah, sebagai hasil kesepakatan kehendak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Hasil observasi awal saya di SMA Negeri 1 Muaro Jambi, juga menemukan ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat di berlakukannya kebijakan manajemen berbasis sekolah tersebut, seperti beban kerja guru yang semakin meningkat, kendala dalam saling koordinasi antarwarga sekolah, guru di tuntutan untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran, dan kepala sekolah di tuntutan untuk lebih bertanggung jawab.

Dari sisi lain, menurut penelitian yang dilakukan oleh Renaningtyas (2013) dalam penelitiannya mengenai Analisis pelaksanaan kebijakan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madiun. Menyatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia dan pemberian otonomi yang lebih luas kepada kepala sekolah dengan tujuan meningkatkan hasil pendidikan melalui peningkatan kinerja dan partisipasi sekolah. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan menentukan bagaimana program kerjanya untuk kedepannya, meningkatkan kemitraan relasi, menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kelulusan dan keterbukaan infrastruktur.

Menurut Ambarita (2016) kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah dan pendidikan dapat direalisasikan. Sebagai motivator, kepala sekolah dituntut senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja sekolahnya. Kepala sekolah sebagai penentu arah kebijakan sekolah, harus dapat mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan efisien dapat dilihat berdasarkan beberapa kriteria, seperti Mampu memberdayakan guru -guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, Mampu menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan, Menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah, Bekerja dengan tim manajemen, dan Mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan James (2013) mengatakan bahwa kepala sekolah harus melakukan lima aktivitas utama, yaitu: Merumuskan visi untuk kemajuan akademik siswa, menciptakan suasana sekolah yang layak untuk pendidikan dan pembelajaran, menanamkan sikap kepemimpinan terhadap seluruh staf akademik dan non akademik, meningkatkan pembelajaran, dan mengelola staf akademik dan non-akademik dalam rangka mempercepat kemajuan sekolah.

Keberadaan Manajemen berbasis sekolah di sekolah membuat peran kepala sekolah menjadi sangat penting dalam meningkatkan dan memajukan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan hasil dari pendidikan (*output*). Mulyasa (2006)

menyatakan bahwa Dinas pendidikan telah menetapkan kepala sekolah harus bisa mengambil peran penting sebagai pendidik, manajer, administrator dan supervisor. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, peranan guru sebagai tenaga pendidik merupakan kunci keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah, karena guru merupakan pedoman dalam lingkungan sekolah yang langsung berhubungan dengan peserta didik.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan satuan Pendidikan, khususnya mutu pendidikan nasional, misalnya dalam pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, maupun perbaikan sarana dan prasarana pendidikan (Nurkolis, 2003). Salah satu aspek yang berfungsi dan berperan dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah pendidikan. Dengan demikian, pendidikan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan SDM yang berkualitas dan lebih terjangkau. Jadi permasalahannya disini adalah rendahnya kualitas proses dan hasil pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan yang ada.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) atau sering di sebut dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Hal ini diartikan sebagai model manajemen yang memberi otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung

warga sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pemberian upaya dalam memberikan harapan akan berlangsungnya dan terkendalinya kualitas pendidikan. Namun karena pengelolaan terlalu sentralistik dan kaku, maka berbagai program di laksanakan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, namun tidak memberikan dampak yang positif, bahkan angka partisipasi pendidikan nasional dan kualitas pendidikan Indonesia menurun. Penurunan kualitas pendidikan erat kaitannya dengan masalah manajemen sehingga muncul pemikiran kearah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepala sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas, pemikiran peningkatan peran sekolah dalam pengelolaam sekolah yang di sebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Mulyasa, 2007).

Agus Dharma (2003) menyatakan bahwa Sekolah yang melaksanakan MBS akan memiliki keuntungan seperti, Lebih berinisiatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah, sekolah memiliki kebebasan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sekolah lebih menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi kelangsungan sekolah sehingga dapat melakukan antisipasi, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya sehingga dapat meyesuaikan dengan kondisi dengan apa yang harus tersedia dan dapat lebih efektif memenuhi kebutuhannya dengan mengambil keputusan mandiri, sekolah dapat menggunakan sumber daya sekolah dengan lebih efektif dan efisien karena ada control dari berbagai pihak dan warga sekolah,sekolah

lebih bertanggung jawab tentang mutu pendidikan kepada *stake holders* sekolah secara langsung sehingga sekolah lebih berupaya dalam mencapai mutu pendidikan melalui program-program sekolah, dan sekolah dapat dengan lebih cepat merespon aspirasi warga sekolah dan lingkungan yang dinamis dan cepat berubah.

Pelaksanaan MBS sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan menghadapi berbagai hambatan bahkan kegagalan, yaitu: belum semua pihak bersedia terlibat langsung dalam program sekolah, kinerja guru dan staf lainnya tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan, meningkatnya kebutuhan pengembangan staf sehingga berimbas pada peningkatan biaya pendidikan, terjadinya kebingungan karena tugas dan tanggung jawab baru, dan tugas guru tidak semata-mata mengajar tetapi juga harus mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan mencapai mutu pendidikan, serta dengan partisipasi orang tua sering diartikan dengan penggalangan dana, orang tua terlalu percaya pada sekolah dan belum terlibat pada upaya-upaya peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung (Nurkolis, 2006). Dengan demikian, hambatan yang dialami sekolah dengan adanya MBS dapat diatasi oleh sekolah tersebut apabila warga sekolah mulai memahami aturan dari MBS itu sendiri. Misalnya dalam program kerja yang dilaksanakan di sekolah tersebut warga sekolah harus menaati mematuinya.

Manajemen berbasis sekolah merupakan pendekatan sekolah yang di pandang masih baru bagi beberapa sekolah negeri sehingga belum banyak informasi menyangkut model pelaksanaan MBS yang ideal di sekolah. Uji coba dilakukan pada 140 SMA dan 248 SMP pada tahun 1999, pada tingkat sekolah dasar tidak di uji coba

tetapi diterapkan langsung (Bappenas, 1999). Salah satu sekolah dasar di Yogyakarta yang melaksanakan MBS adalah SDN Serayu. Sekolah Dasar Negeri Serayu tergolong sekolah favorit di Yogyakarta dan telah menerapkan MBS sejak tahun 2000. Banyak orang tua ingin menyekolahkan putra putrinya di SDN tersebut, menurut data siswa baru 2009, tercatat pendaftar untuk 84 kursi siswa baru. Prestasi SDN ini sudah di kenal di kalangan orang tua di Yogyakarta, pada tahun 2009 menduduki peringkat 4 di ujian akhir nasional sekolta Yogyakarta. Dapat kita lihat bahwa penerapan MBS dapat meningkatkan kualitas pendidikan dari tingkat pembelajarannya dan prestasi yang di capai.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan manajemen berbasis berdampak baik bagi sekolah. Namun dalam pelaksanaannya belum di lakukan dengan optimal dan masih sangat perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Karena dengan adanya kebijakan manajemen berbasis sekolah dapat menjadikan sekolah menjadi sekolah unggul, dan dapat memajemen sekolah secara mandiri. Di SMA Negeri 1 Muaro Jambi penerapan manajemen berbasis sekolah dapat di katagorikan belum mencapai maksimal karena ada beberapa hambatan yang di alami oleh beberapa guru dalam pelaksanaannya, kurangnya pengarahan tentang kebijakan manajemen berbasis sekolah, beban kerja yang semakin meningkat, beberapa guru tidak berminat untuk terlibat dalam kebijakan ini. Dalam pelaksanaan di lapangan juga penerapan kebijakan ini terdapat kendala bagi guru yang dimana guru harus merancang ulang proses pembelajaran yang signifikan, dan guru di tuntutan untuk lebih mampu memaksimalkan proses belajar mengajar di sekolah.

Berdasarkan observasi awal penulis yang terkait dengan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Muaro Jambi bahwa perspektif guru dan kepala sekolah masih ada kendala atau hambatan yang dialami di SMA Negeri 1 Muaro Jambi dan banyak mengalami perubahan yang signifikan. Maka dari itu, melihat pentingnya lembaga pendidikan dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah, dan begitu besar peran guru dan kepala sekolah dalam mengadakan pendidikan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Muaro Jambi : Perspektif Guru dan Kepala Sekolah”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perspektif Guru dan Kepala Sekolah tentang kebijakan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Muaro Jambi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang di kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Mengetahui perspektif Guru dan Kepala Sekolah terhadap kebijakan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Muaro Jambi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian tentang Perspektif Guru dan Kepala sekolah terhadap kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah yang ada di SMA NEGERI 1 kabupaten Muaro Jambi. Di harapkan akan bermanfaat baik bagi sekolah yang bersangkutan, khususnya untuk

peneliti sendiri di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dengan mendapatkan kemampuan profesional agar dapat memotivasi diri sendiri dan untuk melakukan studi lanjut dalam aspek yang sama atau yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam hal ini, penelitian ini berguna bagi pendidikan, beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Perspektif Guru dan Kepala Sekolah tentang Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Muaro Jambi dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan dalam dunia pendidikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Sekolah, dapat memberikan wawasan atau masukan untuk membuat suatu perencanaan pendidikan dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.

- b. Bagi Kepala Sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, dan melihat bagaimana perspektif guru dalam menerapkan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di sekolah tersebut.

- c. Bagi peneliti, dapat mengetahui lebih dalam bagaimana perspektif guru dan kepala sekolah mengenai manajemen berbasis sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Muaro Jambi.

- d. Bagi guru, penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan informasi tentang bagaimana penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah tersebut.
- e. Bagi Universitas, dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### **1.5. Batasan Masalah**

Penelitian ini tentang perspektif guru dan kepala sekolah terhadap kebijakan manajemen berbasis sekolah. Beberapa hal yang menjadi batasan masalah adalah pertama, penelitian ini memfokuskan bagaimana perspektif guru dan kepala sekolah terhadap manajemen berbasis sekolah. Kedua, penelitian ini hanya di lakukan di sekolah SMA Negeri 1 di kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan teknik wawancara.

### **1.6. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan di dalam mengartikan istilah di dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa pengertian istilah atau definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Perspektif**

Martono (2010), menyatakan bahwa suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

#### **2. Guru**

Imran (2010), menyatakan bahwa guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.

### 3. Kepala sekolah

Mulyasa (2007), menyatakan bahwa kepala sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan, dan sebagai supervisor di sekolah yang di pimpinnya.

### 4. Manajemen

Menurut Stoner (2006), menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan sebelumnya.

### 5. Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Myres & Stonehill di kutip dari Umaedi (2008), menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah startegi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan ke masing-masing sekolah sehingga kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik mempunyai control

yang lebih besar terhadap pendidikan. Selain itu, Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2009), menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional serta peraturan yang berlaku.

